

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2002:2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun.

Mursyidi (2010:17) menyatakan bahwa: “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan“.

Soemarso (2009:14) menyatakan bahwa Akuntansi “Suatu Pengantar yang menerangkan bahwa: “Akuntansi (accounting) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien”.

American Accounting Association oleh Sony Warsono Bin Hardono (2010:5): Menyatakan akuntansi adalah sebagai berikut: “Proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi”.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Akuntansi adalah Pengertian akuntansi berarti memerlukan analisis dari transaksi dan dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan dan argumentasi.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang disampaikan manajer dalam memberikan informasi kepada para *stakeholder*, hal ini berguna untuk meyakinkan *stakeholder* perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan, dan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Fauzan: 2012). Menurut Kasmir (2013:114):

“*Rasio Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Agus Sartono (2010:122) menyatakan bahwa: “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri”.

Jati (dalam Suryono dan Prastiwi, 2011) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara luas kepada para pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin tinggi pula luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang mempunyai profit tinggi, cenderung akan membuka cabang atau lini baru sehingga dapat memperbesar keuntungan investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.”

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.2.3 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.2.4 Metode Pengukuran Profitabilitas

Ada beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio *profitabilitas*. (Martono dan Harjito, 2010:59), sebagai berikut:

1. *Gross profit margin*
2. *Net profit margin*
3. *Return on investment* atau *return on assets* dan
4. *Return on equity*.

1. Gross Profit Margin

Merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin*

Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Return On Investment atau Return On Assets*

Rasio ROI atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (*assets*) yang dipergunakan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return On Equity*

Return on Equity (ROE) atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Rasio *profitabilitas* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio *profitabilitas* yang sering digunakan yaitu

Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin dan Net Profit Margin.

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui. Hery (2016:193).

Dari semua rasio profitabilitas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, karena mengacu pada profitabilitas (*profitability*) dan efisiensi operasional (*operational efficiency*). ROA sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis dibandingkan kompetitor dan industri sejenis. ROA dihitung dengan cara: Penghasilan bersih / total aset. Dimana total aset adalah gabungan antara utang (*liability*) dan modal (*equity*).

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, karyawan yang banyak, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, dan struktur kepemilikan yang lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding

perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suryono dan Prastiwi, 2011). Menurut Fery dan Jones dalam Widiyanto (2011) mengenai ukuran perusahaan: “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva.”

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Ukuran perusahaan dapat diukur dari aset yang dimiliki perusahaan. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Perusahaan yang besar, umumnya memiliki jumlah aset yang besar pula.. Menurut Lech (2013: 57) ukuran perusahaan dapat ditunjukkan dengan total asset, jumlah pegawai dan total penjualan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha dikemudian hari. Aset adalah manfaat ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu, Kieso, et al (2008, h.193). Total aset adalah

keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar.

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) adalah “besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”

Menurut Hartono (2008: 14) ukuran perusahaan (firm size) adalah sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva /besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Menurut Husnan (2007: 45), ukuran perusahaan adalah “... suatu skala

dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva log size, nilai pasar saham dan lain-lain”.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Ukuran Perusahaan adalah besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total atau nilai aktiva.

2.1.3.2 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2007: 23) pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Menurut Widiyanto (2011) ukuran perusahaan dapat diukur dengan log of total assets. Log of total assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ze = \text{Log of Total Aset}$$

Sedangkan menurut Juniarti dan Corolina (2005) ukuran perusahaan merupakan besaran perusahaan yang ditentukan dari jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logaritma total asset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran variable ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln \text{ Total Aktiva}$$

Menurut Niresh (2014) dalam Sastriana (2013) bahwa ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan dua rumus yaitu:

1. Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset
Asset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2008:31) komponen atau isi yang terkandung dalam suatu asset dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Aset lancar yaitu asset-aset yang relative mudah untuk dikonversikan menjadi uang, dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Aset lancar meliputi: kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.
- b. Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur dengan jelas (tangible) dan yang bersifat permanen. Aset tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2 yaitu: aset tetap berwujud (gudang, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) dan aset tetap tidak berwujud (*goodwill*, hak cipta, hak paten, *franchise* dan merek dagang)
- c. Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kriteria diatas.

Semakin besar asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Ukuran Perusahaan = Ln Total Penjualan

Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Kasmir (2013:305) “Penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah”. Menurut Reeve, dkk (2009:280) “Penjualan adalah total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit”.

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu, laba

perusahaan akan meningkat selanjutnya juga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.1.4 Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah:

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika,

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite Audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan dan juga menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal

auditor (Surya dan Yustivandana, 2006). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris (Hasnati, 2003 dalam Surya dan Yustivandana, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Komite Audit adalah pihak yang menjembatani antara auditor dan manajemen perusahaan, komite audit bertindak secara independen dan harus bebas pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab terhadap dewan komisaris.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur menggunakan:

$$Komite\ Audit = \text{Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun}$$

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011), komite audit dapat diukur menggunakan:

$$Komite\ Audit = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Rumus diatas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 41/PM/2003 yang menyatakan bahwa ukuran keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

“Ukuran keanggotaan komite audit sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga)

orang anggota, diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Pertimbangan anggota komite audit berjumlah lebih dari satu orang disebabkan agar antar anggota komite audit dapat saling bertukar pikiran dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan ukuran komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.5 Pengungkapan *Sustainability Report*

2.1.5.1 Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Development*)

Brutland report merupakan suatu dokumen awal yang membahas mengenai konsep awal dari *sustainability*. Dokumen tersebut membahas mengenai dua masalah utama yakni pembangunan dan lingkungan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan versus sumber daya, atau sebagai jangka panjang versus jangka pendek. Pengertian *sustainability* yang diadopsi dari United Nations (dalam *Agenda for Development*) yakni pembangunan yang wawasan multidimensional dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi.

Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan akan saling tergantung dan memperkuat komponen-komponen yang ada pada pembangunan berkelanjutan Adapun tujuan dari *sustainable development* adalah

menyeimbangkan antara dua kepentingan sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dua tujuan ini saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. *Sustainable development* tercapai ketika perusahaan telah berpijak dalam konsep *triple bottom line*.

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut SD akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang.

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berbeda dengan laporan keuangan. Selain sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan, laporan ini diungkapkan sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan berada. *Sustainability report* menjadi media informasi bagi para *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi, adanya *sustainability report* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri.

Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik kontribusi yang positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses yang membantu organisasi dalam menetapkan sasaran, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan terhadap ekonomi global berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan merupakan salah satu yang menggabungkan *profitabilitas* jangka panjang dan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut GRI (2006), pelaporan keberlanjutan dapat menjadi platform untuk menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola organisasi, yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Aspek yang dianggap penting oleh organisasi, terkait dengan harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan, mendukung pelaporan keberlanjutan. Pemangku kepentingan dapat mencakup mereka yang berinvestasi pada organisasi serta mereka yang memiliki hubungan lain dengan organisasi. Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan.

Sebagai awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakuakn dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan,

boros terhadap SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Dari berbagai pengertian pembangunan berkelanjutan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Meliputi aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun konsep “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menlajalani kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi mendalam. konsep yang berbeda

juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko (lingkungan) sentrisme dan antropo (manusia) sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.

2.1.5.2 Konsep *Triple Bottom Line*

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang memperhatikan dan mengukur performa tidak hanya dari sudut finansial saja tetapi juga dari sudut lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan dituntut oleh berbagai pihak dari *stakeholder* untuk lebih transparansi dan akuntabel dalam kegiatan yang berhubungan dengan *sustainable* perusahaan. Menurut Warsono dkk (2009:32), istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian profit, namun juga fokus pada people dan planet. Ketiga hal ini sering disebut dengan *triple bottom line*.

1. *Profit*

Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan profit. Perusahaan dapat berkelanjutan jika mendapatkan profit secara terus menerus. Dengan profit yang didapatkan perusahaan, perusahaan dapat tetap *going concern*. Namun dalam kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan profit saja, namun juga *people* dan *planet* yang terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilalaikan oleh perusahaan.

2. *People*

Perusahaan memerlukan *people* baik investor, karyawan, supplier, konsumen, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Perusahaan memerlukan investor untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik para investor, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan investor dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Karyawan sebagai pendukung proses produksi memerlukan perhatian perusahaan atas pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Karyawan memerlukan perhatian atas gaji, pelatihan, pendidikan, dan jaminan-jaminan. Mengelola hubungan yang baik dengan supplier, konsumen, dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan pencitraan baik bagi perusahaan.

Perusahaan yang memiliki hubungan yang baik dengan supplier dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan keterikatan sehingga dapat memperlancar proses pemesanan bahan baku dan pelunasan utang dagang. Hubungan yang baik perusahaan dengan konsumen serta kualitas produk yang baik dapat berdampak pada tingkat loyalitas konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Semakin baik hubungan perusahaan dengan konsumen maka akan semakin loyal konsumen tersebut terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan dan terlibat dalam kegiatan yang diadakan perusahaan.

Perusahaan dan masyarakat sekitar harusnya dapat berhubungan dengan baik. Kegiatan operasi perusahaan dengan pengelolaan yang tidak baik dapat

mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang terusik akan melakukan protes yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Dengan pencitraan baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang berlipat. Dengan perusahaan fokus terhadap lingkungan sekitar, berbagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup akan mendukung kegiatan dan keberlangsungan perusahaan.

3. *Planet*

Perusahaan juga harus memperhatikan *planet* (lingkungan) karena perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara serampangan dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Rusaknya lingkungan tidak hanya disebabkan penggunaan SDA secara serampangan, namun juga karena tercemarnya lingkungan sebagai akibat dari kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengolah limbah dari kegiatan operasional perusahaan. Kerusakan lingkungan yang berimbas pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku produk dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisien yang memastikan ketersediaan SDA untuk generasi selanjutnya dan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan sekitar tidak tercemar.

2.1.5.3 Definisi *Sustainability Report*

Menurut Fauzan (2012) *sustainability report*:

“Laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*)”.

Sustainability report adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder* (GRI,2006: 3).

Menurut Daly dalam Suryono (2011) bahwa:

“*Sustainability* merupakan suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.”

Menurut Effendi (2009:109), laporan keberlanjutan adalah:

“Laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yaitu suatu laporan yang bersifat nonfinansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan”. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability*:

1. “Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut untuk diperbarui kembali;
2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya;
3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.”

Global reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang berpusat di Amsterdam Belanda. Aktivitas utamanya difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standard an pedoman pengungkapan *sustainability report* (Imam dan Sekar,2014:6). *Sustainability report* yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam satu periode tertentu. Pelaporan *sustainability report* dibagi menjadi tiga komponen (Alkington (1997) dalam Fauzan, 2012:2) yaitu: Kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian *Sustainability Report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi kinerja keuangan saja tapi informasi nonfinancial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder*.

2.1.5.4 Manfaat Sustainability Report

GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan standarisasi pelaporan tersebut untuk menanggapi permintaan terhadap informasi yang terdapat pada *sustainability report* yang akan menguntungkan pelaporan perusahaan dan kepada yang menggunakan informasi laporan sejenis. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (www.oecd.org) manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.5.5 Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*. Dimana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara di Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK No.1 (revisi 1998) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi:” Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“. Dalam kaitannya dengan *sustainability development*, tidak hanya ada isu tunggal saja yang terdapat di dalamnya melainkan isu ekonomi, isu sosial serta isu lingkungan.

Sebagian besar bentuk pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan, dengan media ini siapa saja dapat mengakses

sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan *sustainability report* mengandung narrative text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan *sustainability* perusahaan.

Sustainability reporting dapat didesain oleh manajemen sebagai cerita retorik untuk membentuk image (pencitraan) pemakainya melalui pemakaian *narrative text*. Menurut Sari (2013), untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

2.1.5.6 Prinsip-Prinsip *Sustainability Report*

Sustainability report sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip menurut GRI (2006) adalah sebagai berikut:

1. “Keseimbangan
Sustainability report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.
2. Dapat Diperbandingkan
Sustainability report berisi isu-isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan dengan seksama sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.
3. Kecermatan
Informasi yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.

4. Ketepatan Waktu
Pelaporan *sustainability report* tersebut harus terjadwal serta informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para *stakeholder* ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.
5. Kesesuaian
Informasi yang diberikan dalam *sustainability report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh *stakeholder*. *Stakeholder* harus dapat menemukan informasi yang diperlukan dengan mudah.
6. Dapat Dipertanggungjawabkan
Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi dari *sustainability report*.”

2.1.5.7 Indikator Sustainability Report

Sustainability report dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut Menurut Khomsiyah (2009:25), *sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut.

Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. Pengungkapan *sustainability report* diukur dari pengungkapan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan indikator GRI yang diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah GRI Guidelines Versi 3 menyebutkan bahwa, perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas

perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar disclosure.

Sustainability report menggunakan standar dari GRI berisi 6 indikator yaitu:

1. “Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*)
5. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)
6. Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*).”

Adapun item yang digunakan dalam pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indeks Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan GRI Indikator

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
EKONOMI	Aspek: Kinerja Ekonomi
	EC1: Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
	EC2: Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
	EC3: Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
	EC4: Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
	Aspek: Kehadiran Pasar

	EC5: Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC6: Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC7: Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
	Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	EC8: Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
	EC9: Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
	Aspek: Material
	EN 1: Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.
	EN2: Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.
	Aspek: Energi
	EN3: Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.
	EN4: Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer.
	EN5: Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.
	EN6: Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta

LINGKUNGAN	<p>pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.</p>
	<p>EN7: Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.</p>
	<p>Aspek: Air</p>
	<p>EN8: Total pengambilan air per sumber.</p>
	<p>EN9: Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.</p>
	<p>EN10: Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.</p>
	<p>Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)</p>
	<p>EN11: Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.</p>
	<p>EN12: Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).</p>
	<p>EN13: Perlindungan dan Pemulihan Habitat.</p>
	<p>EN14: Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</p>
	<p>EN15: Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional</p>

	dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.
	Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah
	EN16: Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.
	EN17: Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya dirinci berdasarkan berat.
	EN18: Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.
	EN19: Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) dirinci berdasarkan berat.
	EN20: NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya yang dirinci berdasarkan jenis dan berat.
	EN21: Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.
	EN22: Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
	EN23: Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.
	EN24: Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
	EN25: Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
	Aspek: Produk dan Jasa

	EN26: Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
	EN27: Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
	Aspek: Kepatuhan
	EN28: Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi
	EN 29: Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
	Aspek: Menyeluruh
	EN30: Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan
	Aspek: Pekerjaan
	LA1: Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
	LA2: Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
	LA3: Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. LA15: Rasio Karyawan yang kembali dikerjakan setelah keluar dari perusahaan menurut jenis kelamin
	Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen

TENAGA KERJA	LA4: Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
	LA5: Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan
	LA6: Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
	LA7 : Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
	LA8: Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
	LA9: Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
	Aspek: Pelatihan dan Pendidikan
	LA 10: Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
	LA11: Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
	LA12: Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

	<p>Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara</p> <p>LA13: Komposisi badan pengelola/pengusaha dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.</p> <p>LA14: Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan. LA15: Jaminan Kembali Kerja</p>
	<p>Aspek: Praktek Investasi dan Pengadaan</p> <p>HR1: Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.</p> <p>HR2: Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM.</p> <p>HR3: Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.</p> <p>Aspek: Nondiskriminasi</p> <p>HR4: Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.</p> <p>Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul</p> <p>HR5: Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.</p>

HAK ASASI MANUSIA	Aspek: Pekerja Anak
	HR6: Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
	Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib
	HR7: Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
	Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan
	HR8: Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.
	Aspek: Hak Penduduk Asli
	HR9: Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.
	Aspek: Penilaian
	HR10: Persentase dan jumlah total pelaksanaan penilaian atau peninjauan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
	Aspek: Remediasi
HR11: Jumlah keluhan mengenai hak asasi manusia yang telah diselesaikan oleh mekanisme keluhan.	
	Aspek: Komunitas
	S01: Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.

SOSIAL	SO9: Operasi yang berpotensi atau memberikan dampak negatif kepada komunitas lokal.
	SO10: upaya pencegahan dan peringatan terhadap penerapan potensi operasi yang berpotensi memberikan dampak negatif.
	Aspek: Korupsi
	SO2: Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
	SO3: Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
	SO4: Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
	Aspek: Kebijakan Publik
	SO5: Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
	SO6: Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
	Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing
	SO7: Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
	Aspek: Kepatuhan
	SO8: Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	

PRODUK	PR1: Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
	PR2: Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
	Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa
	PR3: Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
	PR4: Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
	PR5: Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
	Aspek: Komunikasi Pemasaran
	PR6: Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
	PR7: Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
	Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan
	PR8: Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
	Aspek: Kepatuhan

	PR9: Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.
--	--

2.1.5.8 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report*

Menurut Jalal (2010) dalam Idah (2013), pembuatan dan penyebaran sustainability report (Laporan Keberlanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, *stakeholder convening*, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah.
4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.”

2.1.5.9 Metode Pengukuran *Sustainability Report*

Pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sementara (*voluntary*) artinya belum ada standar baku yang memuat cara pengungkapannya sehingga hal ini dikembalikan kepada kebijakan dari pihak manajemen masing-masing perusahaan. *Sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut.

Menurut Cooke (1989) dalam Dian (2014) rumus perhitungan pengungkapan *Sustainability Report* adalah sebagai berikut:

$$\text{SDI} = \frac{\text{TSD}}{\text{MSD}}$$

Keterangan:

SDI = *Sustainability Disclosure Index*

TSD = Total *Sustainability Disclosure* (Jumlah item yang diungkapkan dalam *sustainability report*)

MSD = *Maximum Sustainability Disclosure* (Jumlah indikator yang terdaftar dalam GRI yaitu 84 item).

2.1.5.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sustainability report

Menurut Anitya Ardiyani Puspita (2014) dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Sustainability Report* adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *growth option*, komitmen perusahaan, kepemilikan publik dan umur perusahaan.

Sedangkan menurut Dita Rohmah (2015), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Sustainability Report* adalah Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.

Selanjutnya menurut Luciana Spica Almilia (2008), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Sustainability Report* adalah Ukuran Perusahaan, *Return On Assets* dan Pemegang Saham.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* telah banyak mengalami perkembangan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mencoba menelaah lebih luas mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan dengan variasi jenis perusahaan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* masih tergolong pada fase awal.

Kebanyakan penelitian-penelitian di Indonesia, lebih mengarah untuk meneliti bagaimana praktik pengungkapan *sustainability report* berdasarkan standar yang dikembangkan Global Reporting Initiative (GRI). Beberapa penelitian telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan komite audit serta pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (GCG) terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR)	Terdapat pengaruh positif signifikan yang ditimbulkan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan variabel seperti likuiditas, leverage, aktivitas, dan governance committee tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report suatu perusahaan.	pengungkapan Sustainability Report (Y)	Karakteristik Perusahaan (X1) Corporate Governance (X2)
2.	Mega Putri Yustia Sari (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan,	Variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan	Ukuran Perusahaan (X2)	Kinerja Keuangan (X1)

		dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report	terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan variabel likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report perusahaan.	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Corporate Governance (X3)
3.	Adistira Sri Aulia (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan	Variabel size dan type memiliki pengaruh terhadap sustainability	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Karakteristik Perusahaan (X1)

		Sustainability Reporting dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	reporting disclosure. Sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap sustainability reporting disclosure.		
4.	Chintya Dwi Putri (2013)	Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011)	Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam sustainability report. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif, sedangkan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Corporate Governance (X1) Karakteristik Perusahaan (X2)

			terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam sustainability report.		
5.	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar	Variabel Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Governance Committee berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report), sedangkan current ratio, inventory turnover, size, komite audit, dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report).	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Karakteristik Perusahaan (X1) Corporate Governance (X2)

6.	Fadhila Adhipradana (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report	Variabel-variabel total aset (TA), total karyawan (TK), dan governance committee (GC) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Sementara profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dividend payout ratio (DPR), komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen maupun kepemilikan asing bagi perusahaan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sustainability report.	Ukuran Perusahaan (X2) Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Kinerja Keuangan (X1)
----	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------

7.	Abdul Azis (2014)	Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report	Variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan sustainability report hanya kepemilikan saham manajerial yaitu memiliki pengaruh positif signifikan. Sedangkan, variabel lainnya seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Good Corporate Governance (X1)
8.	Faizatul Hasanah, Heri Yanto, Bestari Dwi Handayani (2014)	Model Pengembangan Good Corporate Governance dan Sustainability Report Pada	Leverage memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas, sementara komite audit dan	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Good Corporate Governance (X1)

		<p>Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>good corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap leverage dan good corporate governance. Leverage berpengaruh negative terhadap good corporate governance, sementara dewan direksi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap good corporate governance. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap dewan direksi dan komite audit. Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap</p>		
--	--	--	---	--	--

			sustainability report, sedangkan good corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap sustainability report.		
9.	Yunita Ratnasari (2011)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam Sustainability Report	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sustainability report. Variabel kontrol terdiri dari size, profitabilitas, dan leverage. Hanya leverage yang memiliki pengaruh signifikan	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Good Corporate Governance (X1)

			terhadap luas pengungkapan sustainability report.		
10.	Idah (2013)	Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan Sustainability Report	Variable dewan direksi, <i>governance committee</i> , profitabilitas dan ukuran perusahaan <i>sustainability report</i> , sedangkan variable dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> .	Pengungkapan Sustainability Report (Y)	Corporate Governance (X1) Karakteristik Perusahaan (X2)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajer. Pada saat tingkat profitabilitas rendah, para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial dan

dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut (Rusdianto, 2013:46). Hasil penelitian Laraswita (2010), menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

Luciana Spica Amalia (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Profitabilitas perusahaan adalah merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal lain yang mendukung hubungan positif antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan sukarela adalah adanya sumber daya keuangan yang lebih besar bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi untuk menyajikan pengungkapan lain selain yang diwajibkan (sukarela). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama.

Penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan hubungan positif antara profitabilitas dengan inisiatif manajer dalam mengungkapkan *sustainability report*. Ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajemen. Pengungkapan *sustainability report* ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada *stakeholder* untuk mempertahankan dukungan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Selain itu

pengungkapan *sustainability report* juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan para *stakeholder*, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi *stakeholder* selain investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau financial.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Fery dan Jones dalam Faizatul Hasanah, Bestari Dwi dkk (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai *sustainable growth* adalah dengan melalui pembuatan *sustainability report*. *Sustainability report* digunakan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan praktik sosial lingkungan. Pengungkapan laporan ini juga termasuk bagaimana praktik CSR yang telah dirancang dan direalisasi oleh manajer. Semakin besar suatu perusahaan akan memunculkan pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan *legitimasi* perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Menurut Yunita Ratnasari (2011) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan masalah kebajikan sosial dan dasarnya adalah voluntary. Keputusan untuk melakukan suatu tanggung jawab sosial dan untuk mengungkapkannya merupakan kebijakan manajemen

Penelitian Idah (2013) dan penelitian Adhipradana (2014) juga berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Idah dan Adhipradana menggunakan logaritma natural total aset sebagai pengukuran ukuran perusahaan. Total aset adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Semakin besar total aset perusahaan maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan perusahaan besar. Total aset perusahaan yang meningkat berarti kekayaan perusahaan meningkat. Dengan total aset yang besar, perusahaan memiliki daya yang lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pengungkapan informasi sosial pada *sustainability report* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.

Perusahaan dengan total aset yang meningkat menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan meningkat, sehingga dapat lebih banyak kontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Dengan semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang dapat digunakan dalam *sustainability report*.

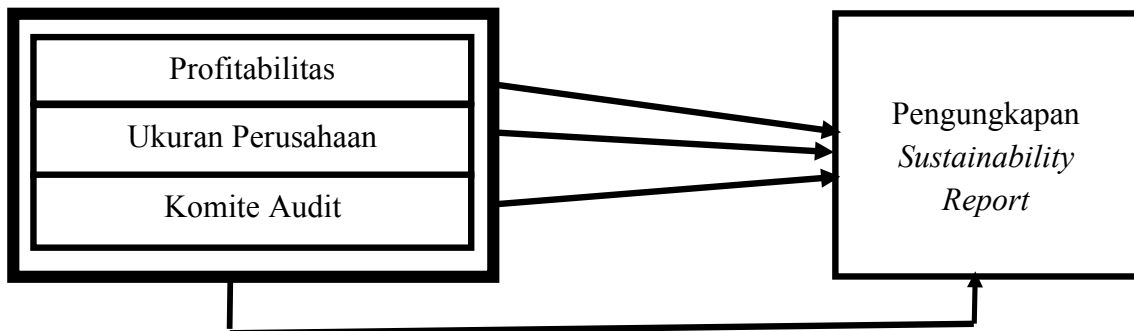
2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua

orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Yunita Ratnasari (2011)). Penelitian yang dilakukan oleh Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011)) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* antara lain:

Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis 3 = Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis 4 = Terdapat pengaruh *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan Komite Audit secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

